



**PENYUSUNAN MATA KULIAH BARU:
REKONSTRUKSI KURIKULUM PERGURUAN TINGGI YANG BERBASIS
KOMPETENSI DALAM PERSPEKTIF FKIP
(Berdasarkan SK Mendiknas RI No. 045/U/2002)**



Makalah disampaikan dalam Lokakarya Penjaminan Mutu
Spesifikasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
18 Agustus 2008 di Auditorium Univet Bantara Sukoharjo.

Oleh

Dr. Farida Nugrahani, M.Hum.

Dosen Kopertis VI Jateng Dpk di Univet Bantara Sukoharjo

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO**

2008

**PENYUSUNAN MATA KULIAH BARU:
REKONSTRUKSI KURIKULUM PERGURUAN TINGGI YANG BERBASIS
KOMPETENSI DALAM PERSPEKTIF FKIP
(Berdasarkan SK Mendiknas RI No. 045/U/2002)**

Oleh Dr. Farida Nugrahani, M.Hum).*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan bersifat universal. Di Indonesia, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dijamin dalam UUD 1945. Sementara itu, maju mundurnya suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya, karenanya, hal itu akan berkait langsung dengan masalah peningkatan mutu pendidikan.

Dewasa ini banyak orang mengeluhkan tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya. Keluhan tersebut, bukanlah muncul tanpa dasar, sebab menurut Umar (2005: 1), *Human Development Index (HDI)*, menyatakan bahwa SDM Indonesia berada pada urutan ke-112 dari 151 negara di dunia, yang berarti mengalami penurunan *ranking* dari urutan ke-110 pada tahun 2002. Sunardi (2004: 1) mengemukakan, indeks yang dicapai Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Tenggara. Meskipun dalam penghitungan indeks tersebut sektor pendidikan hanya merupakan salah satu bagiannya, harus diakui bahwa kontribusi sektor pendidikan itu sangat besar.

Menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia disinyalir telah dipicu oleh berbagai faktor, antara lain akibat terjadinya krisis multidimensional, yang ditandai dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk, munculnya disintegrasi bangsa, dan dekadensi moral yang melanda semua lapisan masyarakat.

*)Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Peninjauan Kurikulum PBSK, 18 Agustus 2008 di Auditorium Univet Bantara Sukoharjo.

Apabila bangsa ini tidak ingin tertinggal lebih jauh lagi dari bangsa-bangsa lain di dunia, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan harus didesain ulang agar lebih berorientasi pada pengendalian mutu lulusannya. Sementara itu, saat ini, dunia sedang mengalami proses penyatuan, hingga seakan-akan dunia tidak lagi ada sekat negara dan bangsa.

Kenichi Ohmae (dalam Sopater, 1998: 173) menyatakan, bukti bahwa dunia sudah menjadi perkampungan global (*global village*), adalah adanya pasar bebas, *informationsuperhighway*, *turisme universal*, *finance scape* yang mengalirkan dana ke berbagai negara, *idea scape* dan *sacri scape* yang mendistribusikan ide politik, hak asasi manusia, dan nilai-nilai keagamaan ke seluruh dunia. Kondisi tersebut telah memacu terjadinya akselerasi perubahan sosial serta kemajuan sains dan teknologi, yang merupakan ciri utama hadirnya abad XXI ini.

Sementara, kecanggihan sains dan teknologi komunikasi itu, mau tidak mau telah menyebabkan terjadinya transformasi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan masyarakat belajar (*learning society*) atau masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Dampak dari semua itu, timbullah persaingan global di berbagai bidang, tanpa kecuali juga dalam persaingan tenaga kerja. Karena itulah, hanya mereka yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang akan dapat *survive* dan memenangkan dunia masa depan.

Akselerasi perubahan situasi dan kehidupan yang semakin kompetitif, menuntut pendidikan tinggi (PT) untuk mengkaji ulang strategi pengembangan, program-program, dan kurikulumnya. Terlebih dengan datangnya era Pasar Bebas 2003 (AFTA) dan globalisasi ekonomi dunia pada tahun 2020, dunia memasuki babak baru dalam peradaban umat manusia.

Dalam rangka menghadapi era global yang ditandai dengan perkembangan ipteks yang telah menyebabkan perubahan tatanan kehidupan sosial budaya itu, pendidikan tinggi perlu melakukan rekonstruksi di berbagai aspek baik dalam aspek kelembagaan, manajemen, SDM, maupun kurikulum. Dengan rekonstruksi tersebut diharapkan pendidikan tinggi mampu berintegrasi dengan lingkungan sosial bangsanya. Adapun yang dimaksudkan dengan integrasi itu menurut Freire (1984: 4), adalah kemampuan untuk menyesuaikan dengan realitas, dan kemampuan kritis dalam membuat pilihan serta mengubah realitas yang ada.

Selain itu, berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan swakelola kampus (otonomi kampus), pemerintah memberikan kesempatan kepada PT untuk melakukan berbagai langkah strategis, agar siap dalam memenangkan kompetisi global pada masa depan yang kini kian sulit untuk diramalkan (*unpredictable*). Karena itu, kurikulum perlu direkonstruksi, didesain ulang agar memenuhi tuntutan akselerasi perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan kemajuan iptek yang kini melahirkan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yakni pendidikan berdasarkan kompetensi pembelajar (*competence-based-approach*).

Kondisi tersebut berimplikasi pada perubahan peran pendidikan tinggi (dalam hal ini khususnya FKIP), sebagai lembaga penyedia calon guru, yang akan berjuang di lapangan dalam mempersiapkan tunas-tunas bangsa dalam menyongsong kehidupan di masa depan.

Permasalahannya adalah bagaimana rekonstruksi desain kurikulum FKIP yang antisipatif dan prospektif? Untuk itu makalah ini akan menguraikan alternatif langkah dalam memecahkan masalah tersebut untuk tujuan peningkatan kualitas lulusan FKIP melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.

B. REKONSTRUKSI KURIKULUM PERGURUAN TINGGI

1. Orientas Lulusan Pendidikan Tinggi

Menghadapi era persaingan global yang Ketat, **Pendidikan Tinggi** harus mampu *mencetak* tenaga sarjana yang memiliki nilai lebih. Kelebihan yang perlu dimiliki oleh sarjana antara lain adalah penguasaan keterampilan khusus yang berkaitan dengan bidangnya, untuk dapat memperkuat bidang keahliannya. Selain itu, harus menguasai komputer, manajemen, dan bahasa asing, serta mampu berpikir kreatif, alternatif, dan inovatif di bidang ipteks, juga mampu mengkomunikasikan pikirannya dengan baik kepada orang lain. Dengan demikian diharapkan sarjana tersebut memiliki daya jual dan daya saing yang tinggi dalam dunia kerja.

2. Paradigma Baru Kurikulum Pendidikan Tinggi

Secara normatif Kurikulum PT diatur dalam dua keputusan menteri yakni Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*; dan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*. Terdapat paradigma baru dalam kurikulum PT 2000 yakni didasarkan pada paradigma kompetensi '*competence-based-approach*' menggantikan paradigma *content-based-approach* pada kurikulum lama.

Pergantian paradigma itu berimplikasi pada: (1) penguasaan aspek kognitif dari instrumental diubah ke bentuk kemampuan, (2) penguasaan aspek afektif dari pragmatis diubah ke komprehensif, dan (3) penguasaan aspek psikomotorik dari adaptif diubah ke profesional (Pusposutardjo, 2002: 32).

Desain kurikulum dengan menggunakan *competence-approach*, *behavioral objectives* menggambarkan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Adapun materi dalam kurikulum bukan merupakan substansi keilmuan semata, melainkan seperangkat

kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk dapat melakukan pekerjaan atau profesi tertentu. Sebenarnya ada desain kurikulum lainnya yakni kurikulum dengan *process-approach*, yang dalam hal ini materi kurikulum, yang lebih menekankan pada keterampilan proses belajar, bukan substansi keilmuannya (Sunardi, 2004: 2-3).

Dalam Kepmendiknas Nomor 232/U/2000, dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian (yang berbentuk mata kuliah), yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di **Pendidikan Tinggi**. Dalam kurikulum tersebut ditentukan seperangkat kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai pembelajar setelah usai proses pembelajaran. Dengan kata lain, penguasaan kompetensi tersebut merupakan tujuan dari kurikulum.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kompetensi menurut Kepmendiknas Nomor: 045/U/2002, adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan. Adapun kompetensi hasil pendidikan setiap program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain. Sedangkan elemen kompetensinya terdiri atas:

- (1) pengembangan kepribadian,
- (2) penguasaan ilmu dan keterampilan,
- (3) kemampuan berkarya,
- (4) sikap dan perilaku berkarya, dan
- (5) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.

Elemen-elemen kompetensi tersebut diadopsi dari keempat pilar pendidikan UNESCO (Ditjen Dikti, 1999), yakni:

- (1) *learning to know*,

- (2) *learning to do,*
- (3) *learning to be, and*
- (4) *learning to live together.*

Karena itu, kurikulum **Pendidikan Tinggi** 2000 diformulasikan dalam kelompok-kelompok mata kuliah sesuai dengan keempat pilar pendidikan tersebut, ditambah dengan muatan lokal yakni kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, yakni:

- (1) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), adalah kelompok mata kuliah untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya terdiri atas Pendidikan, Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (2) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (4) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (5) Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Dalam dataran praktis, ternyata pelaksanaan kurikulum Pendidikan Tinggi 2000 kebanyakan hanya mengalami *regrouping* dari kurikulum Pendidikan Tinggi lama, sehingga sebagian mata kuliah yang dulu masuk kelompok MKU misalnya kini dimasukkan ke kelompok MKK, dan sebagian lagi ke kelompok MPK. Kelompok yang dulu MKDK dan MKK kini menjadi MKK dan MKB (Sunardi, 2004: 5). Padahal filosofi dan paradigmanya berbeda. Kurikulum lama memakai *contence-based-approach* sedangkan kurikulum Pendidikan Tinggi 2000 memakai *competence-based-approach* (berbasis kompetensi). Mencermati dataran praksis tersebut maka sudah selayaknya jika Pendidikan Tinggi melakukan rekonstruksi kurikulum agar dapat mencapai tujuan pendidikan di Perguruan Tinggi.

3. Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kurikulum PT 2000 terdiri atas **kurikulum inti (kurnas)** dan **kurikulum institusional**. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti meliputi kelompok MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum inti program Sarjana (S1) berkisar antara **40% - 80%**.

Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:

- (1) kompetensi utama,
- (2) kompetensi pendukung, dan
- (3) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

Adapun elemen-elemen kompetensi, terdiri atas:

- (1) landasan kepribadian,
- (2) penguasaan ilmu dan keterampilan,
- (3) kemampuan berkarya,
- (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkatan keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan
- (5) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kurikulum inti tersebut merupakan penciri dari kompetensi utama, sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama program studi, ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk SKS antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung dan kompetensi lain di dalam kurikulum disarankan berkisar antara **40-80% : 20-40% : 0-30%**.

Adapun kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Pasal 6 menjelaskan, bahwa Mendiknas tidak menetapkan kurikulum inti tiap program studi, seperti diatur pada Pasal 11 Kepmendiknas Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lainnya.

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)* Bab X dijelaskan, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, daerah, dan peserta didik. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan

tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Dalam menyusun kurikulum diharapkan untuk memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; agama; dinamika perkembangan global; persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Pasal 36). Karena itu, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- (1) pendidikan agama,
- (2) pendidikan kewarganegaraan, dan
- (3) bahasa (Pasal 37).

4. Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi

Untuk menyikapi adanya tuntutan rekonstruksi kurikulum, pengembangan kurikulum dapat dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Identifikasi jenis profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi yang diselenggarakan. Adapun jenis profesi tersebut dapat dikelompokkan menjadi profesi utama dan profesi pendukung. Untuk FKIP Program Studi Bahasa dan Sastra Jawa (PBSJ) misalnya, profesi utamanya adalah guru bahasa Jawa, adapun profesi pendukung yang mungkin dapat menjadi alternatif antara lain adalah *pranataacara*, *pambiwara (MC)*, *pamedarsabda (orator)*, wartawan, penyiar, penulis, penyair, dsb.
- (2) Identifikasi fungsi dan tugas setiap jenis profesi. Misalnya, tugas guru adalah mengajar, memimpin proses pembelajaran, merancang pengalaman belajar, mengembangkan materi, media, dan evaluasi, dsb. Adapun tugas *MC* adalah

memandu acara, bertanggung jawab terhadap pembagian waktu dan kelancaran suatu acara, dsb.

- (3) Identifikasi jenis kompetensi yang berkaitan dengan setiap tugas. Untuk dapat memimpin proses pembelajaran, seorang guru harus memahami tentang materi yang diberikan, memahi tentang manajemen pendidikan, dan untuk menjadi seorang penyiar, seseorang harus mampu menguasai teknik berkomunikasi yang baik, teknik menyiapkan naskah siaran dsb.
- (4) Identifikasi pengalaman belajar bagi setiap jenis kompetensi. Misalnya, untuk mampu meyenggarakan pembelajaran dengan baik, seorang calon guru perlu mendapat pengalaman belajar tentang bagaimana menyipakan materi, memilih metode, menyediakan media, dan merancang serta melaksanakan evaluasi. Jenis kompetensi tersebut yang kemudian secara logis perlu diwadahi dalam mata kuliah-mata kuliah.

Selebihnya itu, hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah dasar hukum yang mengatur tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Tinggi, yaitu Kepmendiknas Nomor: 232/U2000 dan Nomor: 045/U/2002 serta UU No. 20/ 2003. Berdasarkan hal itu, rekonstruksi kurikulum Pendidikan Tinggi dapat disusun sebagai berikut:

Pertama, kurikulum inti tiap program studi ditentukan bersama antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna. Ini berarti terbuka peluang besar untuk menyusun kurikulum inti yang benar-benar antisipatif dan prospektif. **Kurikulum inti** berkisar 40% - 80% dari jumlah muatan kurikulum secara keseluruhan.

Kedua, kurikulum institusional dapat berupa hasil seleksi mata kuliah yang didasarkan atas pertimbangan tertentu akan memperkuat kompetensi lulusan sekaligus memberikan *selective excellence* lulusan tiap program studi. **Kurikulum institusional**

tersebut dapat ditetapkan misalnya 20 % - 30% untuk memberikan ‘**ciri khas**’ institusi Pendidikan Tinggi yang tersebar pada kelompok mata kuliah MPK, MKK, MKBN, MPB, dan MBB.

Khusus untuk MPK, antara Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dengan UU No. 20/ 2003 (Sisdiknas) ada sedikit perbedaan, namun mengingat secara hierarkis UU lebih tinggi ketimbang Kepmendiknas, penyusunan kurikulum dapat berpedoman pada Sisdiknas yakni: kelompok MPK yang wajib diberikan pada pendidikan tinggi adalah: **Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa.**

Mata kuliah bahasa di sini dapat ditafsirkan Bahasa Indonesia (untuk Teknik Penulisan Karya Ilmiah) guna mendukung kemahiran menulis karya ilmiah mahasiswa yang pada umumnya masih sangat memprihatinkan. Selain itu juga Bahasa Inggris sebagai pendukung kemahiran berkomunikasi pada era global.

Adapun untuk kurikulum institusional pada kelompok MPK dapat dimasukkan antara lain mata kuliah Filsafat dan Etika (Jawa), Teori Kebudayaan, Manajemen (Pendidikan), dan Komputer (Terapan).

Ketiga, pada kelompok MKK kita dapat memasukkan mata kuliah yang dapat mendukung spesialisasi atau nilai tambah untuk memperkuat keahlian lulusan di bidang studi masing-masing yang akan meningkatkan daya saing dalam kompetisi global. Tiap program studi harus memiliki **spesialisasi profesi** yang dapat diandalkan, yang belum (banyak) dimiliki oleh PT lain (semacam *selective excellence*) yang jumlahnya sekitar **10% - 20%**.

Berkaitan dengan hal ini, Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa di Univet Bantara Sukoharjo, memasukkan mata kuliah antara lain: **Kepenyiaran, Wisata Budaya, Jurnalistik, dan Ngadisarira Ngadibusana.** Dengan demikian diharapkan

PBSJ dapat menghasilkan sarjana yang memiliki spesialisasi unggulan, yang dapat membuka peluang lebih luas dalam kompetisi tenaga kerja.

Perlu ditekankan bahwa pemilihan kelompok MPK institusional harus berdasarkan argumentasi rasional dan realistis dengan berorientasi pada *user* dan *stakeholders*. Penetapannya bukan atas nama retorika ilmiah tetapi disusun didasarkan pada pengkajian terhadap fakta di lapangan mengenai kebutuhan yang sedang berkembang dalam masyarakat pengguna lulusan (*user*) dan pihak terkait lainnya (*stakeholders*).

Paradigma tersebut diambil untuk menghapus Penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang memubadhirkan investasi, sebab menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan (Dirjen Dikti, 2001), target penyelenggaraan Perguruan Tinggi memiliki sifat, bermutu, relevan, berdaya saing, produktivitas, reputasi, otonomi, akuntabilitas publik, peningkatan mutu berkelanjutan, dan memiliki standart mutu. Hal tersebut sekaligus sebagai salah satu ciri pembeda kurikulum lama dengan kurikulum Perguruan Tinggi 2000, karena kurikulum lama hanya ditetapkan oleh pihak Perguruan Tinggi saja.

Dengan demikian perbandingan beban ekivalen dalam bentuk SKS antara **kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain** dapat berkisar antara: **60%: 25%: 15%**. Agar lebih jelas, distribusi kelompok mata kuliah dalam pengembangan kurikulum PT 2000 dapat didiskripsikan sebagai berikut:

No	Proses Pembelajaran	SK Mendiknas No. 232/U/2000	Kompetensi
1.	<i>Learning to be</i>	MK Pengembangan Kepribadian (MPK)	Kultural
2.	<i>Learning to know</i>	MK Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	Akademik
3.	<i>Learning to do</i>	MK Keahlian Berkarya (MKB)	<i>Skill</i> menghasilkan produk
4.	<i>Learning to live</i>	MK Berkehidupan Bersama (MBB)	Komunikasi

	<i>together</i>		global
5.	<i>Learning to behave</i>	MK Perilaku Berkarya (MPB)	Profesi

Sementara itu, fakta dilapangan menunjukkan, kurikulum Perguruan Tinggi selama ini lebih menekankan pada pengembangan aspek kognitif atau kecerdasan rasional (*Rational Quotient*), tidak mengutamakan aspek emosional (*Emotional Quotient*). Padahal hasil penelitian membuktikan bahwa kecakapan emosional yang ditandai dengan kemampuan dalam pengembangan inisiatif, kreativitas, pengendalian diri, ketekunan, motivasi, empati, dan kecakapan sosial, justru lebih menentukan kesuksesan seseorang.

Menurut Popham (1994: 179), aspek-aspek kecakapan emosional tersebut merupakan faktor afektif yang dapat membentuk kepribadian yang positif bagi seseorang dan ikut berperan dalam menentukan keberhasilan hidupnya di masa mendatang. Bahkan Goleman (1995: xiii), menegaskan bahwa EQ lebih berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang dibandingkan dengan kecerdasan rasional (*Rational Quotient*). Karena itu kemampuan dalam mengelola EQ perlu diberikan kepada mahasiswa agar mereka mampu memanfaatkan potensi intelektualnya secara optimal. Hal itu sesuai dengan amanat Kurikulum PT 2000 yang memberikan keleluasaan bagi PT dalam mengembangkan visi-misi dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tuntutan zaman yang terus berkembang.

3. Proses Pembelajaran di PT dalam Perspektif KBK

Kurikulum pada umumnya diartikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Menurut Nasution (1993: 12), kurikulum mempunyai empat komponen utama, yaitu, tujuan, bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian. Kurikulum Perguruan Tinggi 2000 berorientasi pada *competence-based-approach* yang hakikatnya dilatari oleh filsafat Humanisme dan Konstruktivisme dalam pendidikan. Filsafat Humanisme

berpijak pada desain *Learner-centered-design*, mahasiswa diberi tempat utama, dan dosen berperan sebagai pendorong dan pembimbing sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, karena mahasiswa memiliki potensi untuk berbuat, berperilaku, belajar, dan juga berkembang sendiri. Menurut Sukmadinata (2002: 117-118), desain pembelajaran yang mendasarkan pada filsafat Humanisme itu, disebut dengan *Humanistic Design*.

Sementara itu, filsafat Konstruktivisme beranggapan, bahwa pengetahuan manusia merupakan konstruksi (bentukan) sendiri (Glaserfeld dalam Suparno, 1997: 18). Seseorang membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan (Bettencourt dalam Suparno, 1997: 18), karena itu, menurut Piaget (dalam Suparno, 1997: 18), pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas dari pengamatan tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan itu berjalan terus-menerus dengan setiap kali mengalami reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru. Dalam pembelajaran yang berdimensi konstruktivisme, dosen berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Ada filsafat baru yang secara tersirat dibawa oleh KBK, yaitu cara pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Menurut Kniep (dalam Suyono, 2002: 28), KBK setidaknya memiliki tiga karakteristik utama, yakni:

- (1) berpusat pada pembelajar (*focus on learners*),
- (2) memberikan mata pelajaran dan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual (*provide relevant and contextualized subject matter*), dan
- (3) mengembangkan mental yang kaya dan kuat pada pembelajar (*develop rich and robust mental models*).

Karena itu, pendekatan yang sesuai dengan praktik pembelajarannya adalah pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*), yaitu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk memperoleh pengalaman belajar nyata

dalam mencari dan menemukan pengetahuannya melalui *inquiry*, belajar kooperatif, dan bertukar pengalaman sesama teman. Pembelajaran tersebut bertujuan membekali pembelajar dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan ke permasalahan yang lain dan dari satu konteks personal, sosial, atau budaya ke konteks lainnya.

Menurut Johnson (2002: 17), komponen pembelajarannya terdiri dari:

- (1) hubungan yang bermakna;
- (2) pekerjaan yang signifikan;
- (3) belajar menyesuaikan diri;
- (4) berkolaborasi;
- (5) berpikir kritis dan kreatif;
- (6) pengalaman individual;
- (7) pencapaian standar yang tinggi; dan
- (8) penilaian autentik.

Menurut Depdiknas (2002: 12-14) proses pembelajarannya menekankan pada kegiatan sbb:

- (1) belajar berbasis masalah;
- (2) pembelajaran autentik;
- (3) belajar berbasis inkuiri;
- (4) belajar berbasis projek;
- (5) belajar berbasis kerja;
- (6) belajar layanan; dan
- (7) belajar kooperatif.

Adapun pelaksanaannya melibatkan tujuh komponen utama, yaitu: konstruktivisme (*constuctivism*), menemukan (*inquiry*), bertanya (*quastioing*),

masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modelling*), refleksi (*reflection*), dan penilaian sebenarnya (*authentic assesment*) (Depdiknas, 2003: 5).

Menurut Suparno (2003: 3), bentuk belajar dalam pendekatan kontekstual meliputi:

- (1) *relating*, yaitu belajar dalam konteks kehidupan nyata;
- (2) *experiencing*, yaitu belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan;
- (3) *applying*, yaitu belajar menerapkan pengalaman ke dalam kebutuhan praktis;
- (4) *cooperating*, yaitu belajar berbagi informasi; dan
- (5) *transferring*, yaitu belajar memanfaatkan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru.

Dinyatakan oleh Nurhadi (2003: 1), dengan pendekatan tersebut hasil pembelajaran akan lebih bermakna bagi pembelajar karena prosesnya lebih alami.

Melalui pendekatan kontekstual model pembelajaran yang disarankan oleh Joyce & Weil (1996: 7), dapat dipilih sebagai alternatif, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk membantu pembelajar dalam memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri, dan bagaimana untuk belajar. Untuk itu dapat diterapkan metode *inquiri*, *discovery*, *sosiodrama*, *role-playing*, *diskusi*, *pementasan naskah*, dsb.

Selain itu, perlu diusahakan agar situasi pembelajaran dapat memberikan perasaan menyenangkan (*joyful*) kepada pembelajar, sehingga mereka merasa kegiatan itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai suatu hal yang mengasyikkan (Suwandi, 2002: 11). Dengan situasi pembelajaran yang demikian, pelaksanaan kurikulum Perguruan Tinggi 2000 diharapkan dapat meningkatkan gairah belajar mahasiswa, pada gilirannya nanti dapat menghasilkan mutu lulusan seperti yang diharapkan.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian kompetensi mahasiswa sebagai peserta didik di Perguruan Tinggi, perlu dilaksanakan evaluasi dan penilaian hasil belajar. Mengenai hal itu, dijelaskan dalam Kepmendiknas RI No. 232/ U/ 2000 BAB V Pasal 12, bahwa penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, dapat berbentuk ujian, ujian tengah dan akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dari dosen. Adapun penilaiannya dapat dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E, yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

C. Penutup

Mengakhiri pembahasan tentang pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi dalam rangka melahirkan lulusan yang unggul dan memiliki nilai lebih, perlu ditekankan bahwa kurikulum Perguruan Tinggi 2000 yang berbasis kompetensi memberikan kebebasan kepada institusi untuk menyusun kurikulum inti bersama-sama pengguna lulusan dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat merekonstruksi dan menyusun kurikulum baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pengguna, kemajuan ipteks, dan sesuai pula dengan visi-misi dari Perguruan Tinggi.

Implikasinya, andai suatu Perguruan Tinggi mampu memanfaatkan dan memberdayakan keleluasaan yang diberikan oleh Depdiknas dalam merekonstruksi kurikulumnya, niscaya upaya untuk melahirkan sarjana unggulan yang memiliki nilai lebih dan daya saing yang kompetitif dan komparatif bukan lagi menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk dapat dicapai. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA:

- Depdiknas. 2000. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000* tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: Ditjen Dikti.
- _____. 2002. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002* tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti.
- _____. 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Pembelajaran Kontekstual*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- _____. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003* tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2003. *Pendekatan Konstekstual (Contextual Teaching and Learning)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- Dirjen Dikti. 2001. *Penjelasan Umum tentang Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Author.
- Ditjen Dikti. 1999. *Penjelasan tentang Isi Perubahan Kepmendikbud No. 058/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*. Jakarta: Author.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: Gramedia.
- Goleman, Daniel. 1997. *Emotional Intelligence* (Edisi Terjemahan T. Hermaya). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johnson, Elaine. 2002. *Contextual Teaching and Learning*. Thousand Oaks: CorwinPress, Inc.
- Joyce, Bruce & Weil, Marsha. 1996. *Models of Teaching*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nasution, S.. 1993. Pengembangan kurikulum. Bandung; P.T. Citra Aditya Bakti.
- Nurhadi. 2003. *Pendekatan Kontekstual*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Popham, James W. 1994. *Classroom Assessment*. Los Angeles: University of California.
- Pusposutardjo, Suprodjo. 2002. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Institusi Pendidikan Tinggi di Era Kehidupan Mendunia". *Makalah Seminar Nasional tentang Paradigma Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2000*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sopater, Sularso dkk. (Ed.). 1998. *Pembelajaran Memasuki Era Kesejagatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2002. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunardi. 2004. "Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi". *Makalah* pada Diskusi KBK-Pertemuan Pimpinan PTS Bidang I di Wilayah Surakarta, 18 Maret 2004.

- Suparno, Paul. 1997. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparno. 2003. “Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual” *Makalah*, disajikan dalam Sarasehan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (7- 8 Maret 2003).
- Suwandi, Sarwiji. 2002. “Peningkatan Kompetensi Berbahasa Siswa Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi”. *Makalah* pada Semiloka Implementasi KBK, Ungaran, 18 April 2002.
- Suyono. 2002. “Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kondisi Penerapannya di Sekolah”. *Makalah* pada Simposium Nasional Pembelajaran Bahasa yang diselenggarakan UNNES, 14 Oktober 2002.
- Umar, Jahya. 2005. “Pengembangan Sistem Penilaian Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional di Era Global” dalam Mardapi, Djemari (Ed) *Rekayasa System Penilaian dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. Yogyakarta: HEPI didukung oleh Dikti, Dikmenum, Pusat Penilaian, dan Pascasarjana UNY.

oo0oo